

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi yang merupakan sumber ekonomi nasional di dalam masyarakat, tiga pelaku ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Dari ke tiga pelaku ekonomi itu yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional yaitu koperasi, dimana koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat (Anoraga, 1997).

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan berkoperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan kata lain koperasi sebagai salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan dan tujuan koperasi seperti tersebut di atas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat (Baswir, 2000).

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diharapkan dapat berperan dalam perekonomian nasional. Dimana koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang tugas utamanya adalah memberdayakan perekonomian rakyat umumnya dan anggota khususnya. Salah satu fungsi dalam pengembanan tugas tersebut adalah menghimpun dana dari anggota yang memiliki kelebihan modal dalam bentuk simpanan dan membantu anggota yang memerlukan atau kekurangan modal yang di salurkan dalam bentuk pinjaman melalui unit usaha yang menangani kegiatan ini yaitu unit simpan pinjam (USP) koperasi.

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia tak bisa lepas dari sejarah dan perkembangan koperasi secara umum di Tanah Air. Usaha simpan pinjam telah menjadi basis utama kegiatan koperasi yang menjadikan koperasi terus bertahan dan berkembang tak lekang dimakan zaman. Koperasi Simpan

Pinjam bahkan menjadi tujuan utama pelaku usaha mikro dan kecil dalam mencari sumber pembiayaan yang "ramah" dan mudah di jangkau tanpa syarat berbelit dengan asas kekeluargaan "serasa milik sendiri". Hingga detik ini berkembang pameo ketika menyebut koperasi, orang akan dengan mudah tercititakan koperasi sebagai tempat meminjam uang. Padahal sejatinya usaha koperasi tidak melulu terpatok pada usaha simpan pinjam. Namun demikian kuatnya usaha simpan pinjam sebagai basis kegiatan koperasi menjadikan kegiatan itu lekat menjadi citra koperasi di Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi sebagai lembaga keuangan yang bergerak disektor jasa keuangan mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam menunjang sektor riil yang disuahkan oleh masyarakat koperasi. Bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil yang hanya mempunyai modal yang terbatas unit ini sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh anggota koperasi dalam rangka meningkatkan modal usaha maupun memenuhi kebutuhannya.

Koperasi merupakan wadah dan wahana yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian Indonesia, terutama dalam peningkatan kesejahteraan bagi golongan ekonomi lemah dengan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa. Sehingga keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian adanya koperasi diharapkan dapat mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang

merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sehingga koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional karena koperasi sesuai dengan istilahnya sebagai “soko guru perekonomian” mempunyai arti pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian bagi negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara terbesar kelima dalam jumlah penduduk merupakan pasar yang subur bagi berkembangnya lembaga keuangan mikro. Gonzales – Vega (2002) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan laboratorium pasar keuangan mikro terbesar di dunia, suatu tempat yang keberadaan berbagai lembaga keuangan rakyat tersebut telah melalui berbagai tahapan uji coba, dalam arti lembaga-lembaga tersebut tumbuh dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat setempat.

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik informal, semi formal dan formal (Tohai, 2002). Kemudian Maulana Ibrahim (2002) menyebutkan bahwa secara umum lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bersifat formal dan informal. Lembaga keuangan mikro formal dalam bentuk bank dan bukan bank. Lembaga keuangan mikro formal bukan bank diantaranya adalah koperasi (KSP dan USP) dan pegadaian.

Perlu dikemukakan bahwa koperasi khususnya yang bergerak dalam usaha simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro formal yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya untuk menyimpan dan meminjam dana.

Mengingat cukup strategisnya peran koperasi simpan pinjam dalam menyalurkan dan menampung dana anggota, Bank Indonesia (2001) menyebutkan bahwa dilihat dari jumlah pinjamannya (kredit/pembiayaan yang disalurkan), posisi KSP dan USP termasuk dua besar setelah BRI Unit Desa. Kemudian dilihat dari jumlah lembaganya, KSP dan USP merupakan lembaga keuangan mikro yang paling banyak dan tersebar ke pelosok tanah air.

Pada saat ini, dari beberapa bidang usaha dari koperasi yang ada di masyarakat, unit usaha simpan pinjam lebih banyak berkembang dari pada unit-unit usaha lainnya dari suatu koperasi, hal ini dapat dilihat dengan banyak berdirinya koperasi simpan pinjam di Indonesia karena terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat pengusaha kecil dan masyarakat lapisan bawah. Dengan adanya unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk menghindari praktek lintah darat maupun rentenir dengan menetapkan bunga yang tinggi yang sering beroperasi di kalangan pengusaha kecil, pedagang, petani dan sebagainya.

Selain itu unit usaha simpan pinjam yang dilakukan yang dilakukan oleh koperasi akan dapat membantu meningkatnya perekonomian para anggota dan masyarakat yang ada di daerah kerja sekitar koperasi yang memanfaatkan pinjaman dari koperasi tersebut selain kegiatan penyimpanan yang terdapat di koperasi. Karena salah satu kegiatan dari unit usaha simpan pinjam adalah untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi serta koperasi lainnya atau anggota koperasi lain tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi unit simpan pinjam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan

kegiatan simpan pinjam oleh koperasi pasal satu ayat (3) : “Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan”.

Di era otonomi daerah, Kota Payakumbuh sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat dituntut kemandirian dan kesungguhannya dalam melaksanakan pembangunan daerah, termasuk di bidang perkoperasian. Berdasarkan prinsip otonomi daerah maka Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan menyusun beberapa program yang berkaitan dalam pengembangan koperasi. Program-program yang terkait dengan pengembangan koperasi antara lain :

1. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Pengimplemetasian program tersebut bertujuan untuk mengembangkan sektor koperasi dan UMKM, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh dari tahun 2010 s/d 2014 perkembangan jumlah koperasi yang dibina oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 meningkat sebesar 5,29% yaitu dari 143 unit koperasi pada tahun 2010 menjadi 151 unit koperasi pada tahun 2014. Namun dari jumlah koperasi tersebut hanya 80 persen yang tercatat sebagai Koperasi aktif, dan

Koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin hanya sekitar 58 persen dari jumlah Koperasi aktif. Dalam permodalan koperasi dapat dilihat bahwa nilai aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari semua Koperasi di Kota Payakumbuh pada Tahun 2014 tercatat masing-masing sekitar Rp 145, 114 Miliar dan Rp 3, 099 miliar, sedangkan volume usaha tercatat mendekati Rp 85,2 miliar. SHU sebenarnya adalah bagian terpenting dari kegiatan koperasi yang sangat menentukan kehidupan koperasi atau tingkat partisipasi masyarakat sebagai anggota koperasi.

Akan tetapi pengembangan perkoperasian di Kota Payakumbuh tidak hanya difokuskan pada kuantitasnya saja namun juga pada segi kualitasnya. Di antara 151 unit koperasi yang ada di Kota Payakumbuh pada tahun 2014 terdapat 120 unit koperasi aktif. Dari 120 koperasi aktif tersebut seluruhnya mempunyai unit usaha simpan pinjam. Sebagai lembaga keuangan mikro bukan bank yang diusahakan oleh lembaga ekonomi berbentuk koperasi, Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi mempunyai peluang yang cukup baik untuk mengembangkan usahanya. Kondisi berkembangnya USP koperasi sangat bergantung pada kemampuannya memanfaatkan peluang, baik peluang yang datang dari internal dan peluang eksternal (Sulaeman, 2004).

Koperasi mengalami kendala dalam meningkatkan usaha karena pengelolaan yang bersifat tradisional dan kemampuan organisasi di bidang ekonomi yang terbatas sehingga usaha kegiatan koperasi tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka ada tiga aspek masalah yang dijadikan fokus dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah kondisi Usaha Simpan Pinjam Koperasi di Kota Payakumbuh saat ini?
2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa sajakah yang mempengaruhi pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi di Kota Payakumbuh?
3. Apakah strategi yang diperlukan untuk mengembangkan Usaha Simpan Pinjam Koperasi di Kota Payakumbuh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Kota Payakumbuh pada saat ini.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Kota Payakumbuh.
3. Menyusun strategi pengembangan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Kota Payakumbuh.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran, masukan dan bahan pertimbangan kepada para pembaca, akademisi, dan peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut di bidang koperasi. Selain itu dengan terjawabnya permasalahan yang peneliti bahas, maka akan

menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam bidang koperasi khususnya di Kota Payakumbuh.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih terarahnya penelitian ini perlu dilakukan pembatasan pada hal-hal yang akan diteliti, diantaranya :

- a. Penelitian dilakukan pada koperasi aktif di Kota Payakumbuh yang mempunyai unit usaha simpan pinjam.
- b. Objek penelitian ini adalah pengurus koperasi dan para *stakeholder* Kota Payakumbuh yang terkait dengan penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan penyusunan tesis serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembatasan masalah maka harus disusun secara sistematis.

- BAB 1, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB 2, mengemukakan pendekatan teori dan studi literatur, yang mengemukakan teori-teori dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu dan informasi yang mendukung penelitian.

- BAB 3, merupakan bab metodologi penelitian, memuat tentang lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.
- BAB 4, merupakan bab mengenai gambaran umum daerah penelitian yang mendeskripsikan secara ringkas tentang daerah penelitian di Kota Payakumbuh dalam beberapa aspek.
- BAB 5, merupakan bab mengenai pembahasan hasil penelitian secara rinci, strategi pengembangan usaha simpan pinjam di koperasi Kota Payakumbuh.
- BAB 6, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

